

## Pendidikan Multikulturalisme Gus Dur

Yasser Burhani (1), Giswah Yasminul Jinan (2),  
M. Iman Saepulloh (3), Raja Cahaya Islam (4)

Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: burhanyasser@gmail.com, giswahyasmin26@gmail.com,  
saepulohmohamad@gmail.com, rajacahaya0209@gmail.com

---

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam identitas, mulai dari etnis, adat, agama dan kebudayaan. Keberagaman itu sendiri bisa dianggap sebagai suatu kekayaan, namun tak jarang malah jadi petaka, karena bisa menimbulkan konflik. Pencegahan dan penyelesaian atas konflik itu bisa diupayakan, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan pun mesti dicari bentuknya agar sesuai dengan kenyataan plural masyarakat Indonesia. Pada titik inilah Gus Dur hadir sebagai figur yang mengusung pendidikan multikultural. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan pendidikan multikulturalisme Gus Dur. Adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka, yang mana data diambil dari sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian ini adalah: pertama, pendidikan multikultural ala Gus Dur, menekankan keragaman budaya sebagai latar dari pendidikan; kedua, pendidikan multikultural didasarkan pada keterbukaan yang dialogis, menimbang keberagaman latar peserta didik; ketiga, pendidikan multikultural adalah jenis pendidikan yang didasarkan pada keadilan, yang mana berbasiskan HAM dan nilai-nilai demokratis, dengan demikian tiap latar belakang yang beragam akan dipandang secara "sama" di dalam ruang demokratis.

**Kata Kunci:** Keadilan, Keterbukaan, Multikulturalisme

### **Abstract**

Indonesia is a country that has a variety of identities, ranging from ethnicity, customs, religion and culture. Diversity itself can be considered as a wealth, but not infrequently it becomes a disaster, because it can lead to conflict. Efforts can be made to prevent and resolve these conflicts, one of which is through education. Education must also be looked for in a form to suit the plural reality of Indonesian society. It was at this point that Gus Dur was present as a figure carrying out multicultural education. This research will focus on discussing Gus Dur's multiculturalism education. The method used is literature study, where data is taken

*from relevant sources. The results of this study are: first, multicultural education a la Gus Dur, emphasizing cultural diversity as the background of education; second, multicultural education is based on dialogical openness, considering the diversity of backgrounds of students; third, multicultural education is a type of education that is based on justice, which is based on human rights and democratic values, so that every diverse background will be seen as "the same" in a democratic space.*

**Keywords:** Justice, Openness, Multiculturalism

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam budaya dari berbagai suku bangsa dan adat budaya. Itu berarti, nasionalisme yang digaungkan bangsa Indonesia bukanlah narasi kesukuan, tetapi membawa narasi masyarakat Indonesia yang heterogen. Keadaan ragam suku, agama, ras, adat di Indonesia terjadi dari datangnya para pedagang dari berbagai belahan dunia untuk menjual barang dagangan mereka ke nusantara. Keadaan seperti itu dilakukan terus menerus hingga memunculkan inisiatif untuk menyebarkan agama ke nusantara. Adat Melayu mengklaim bahwa merekalah yang paling pantas disebut sebagai pribumi. Ini terjadi akibat persebaran bangsa Melanesia dan Polonesia. Bangsa melayu yang lebih dulu menginjakkan kaki di tanah nusantara. Merasa adanya superioritas kesukuan yang ada di Indonesia.

Tahun 2018, laman *website* Tirto.id mencatat bahkan tingkat diskriminasi itu hingga pada level menjadi bahan lelucon. Tirto.id memaparkan dari hasil survei komnas HAM bahwa, dari 1.207 responden sebanyak  $\pm$  14,7 persen, responden lebih mencirikan satu suku hanya dengan satu karakter negatifnya, misal suku A dengan karakter negatifnya, seperti arogan dll.<sup>1</sup>

Hasil survei tersebut dilanjutkan dengan infografis bahwa, dari jumlah 1.207 responden 82,7 persennya mengatakan mereka nyaman

---

<sup>1</sup> Ign. L. Adi Bhaskara, *Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolelir*, <https://amp.tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolelir-dahP>, (21 November 2018), diakses pada 24 November 2020, 08.38 WIB.

dengan lingkungan ras yang sama.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan jika masyarakat Indonesia belum seutuhnya siap dengan toleransi atau keberagaman.

Hal ini, direspon dengan penetapan hukum tentang sanksi rasisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 16, yang terancam hukum pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp. 500.000.000.<sup>3</sup> Selain dengan ketetapan hukum, mesti juga ada pembentukan karakter secara pengetahuan yang berbasiskan pada keberagaman dan anti-rasisme. Salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan dalam hal ini, bisa menjadi penawaran dan alternatif terhadap narasi toleransi, memberikan muatan-muatan pembelajaran yang mengajarkan nilai nilai kearifan dan toleransi yang dipakai oleh pendidikan multikultural. Lalu, pendidikan seperti apa yang bisa dipakai atau menjadi solusi atas persoalan rasisme ini? Penulis mengulas bagaimana pemikiran Gus Dur menjadi sebuah solusi untuk menjawab persoalan-persoalan rasisme di Indonesia melalui pendidikan, atau bisa disebut dengan pendidikan multikulturalisme.

Gus Dur disini hadir membawa tawaran sebuah pendidikan multikultural yang pro terhadap keberagaman suku, agama, ras dan adat, baik kesukuan non-Jawa maupun bangsa Tionghoa, Arab dan India yang selalu dianggap bangsa pendatang oleh mereka yang selalu mengaku sebagai bangsa pribumi. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Dengan demikian sumber data yang penulis peroleh didasarkan pada buku jurnal dan *website* yang berkaitan dengan tema yang relevan dengan penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Sekilas Gus Dur

Mengacu pada paparan Resdhia Maula Prachaya, Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disapa Gus Dur, lahir 7 September 1940, di

---

<sup>2</sup> Ign. L. Adi Bhaskara, *Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolelir*, <https://amp.tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolelir-dahP>, diakses pada 24 November 2020, 08.38 WIB.

<sup>3</sup> *Pelaku Rasisme Bisa Dijerat UU Diskriminasi Ras dan Etnis*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pwxxvo409>, (28 Agustus 2019), diakses pada 24 November 2020, 08.58 WIB.

Denanyar Jombang. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Sapaan Gus sendiri merupakan panggilan kehormatan di dalam tradisi khas pesantren Nahdhotul Ulama (NU) kepada seorang laki-laki. Gus sendiri berarti *bagus* atau *mas*.<sup>4</sup>

Gus Dur sendiri lahir dalam lingkungan yang terhormat dan terpadang di kawasan Jawa Timur—dan tentu di Indonesia pula. Kakek dari ayahnya merupakan sosok pendiri organisasi Islam NU yang bernama, K. H. Hasyim Asyari. Sementara kakek dari pihak ibunya ialah pengasuh pondok pesantren yang pertama kali memperkenalkan kelas santri puteri pertama di dunia pesantren Denanyar Jombang, nama sang kakek dari pihak ibu ini adalah K. H. Bisri Syansuri. Ayah dari Gus Dur sendiri adalah tokoh agama dan politik penting pada masa kemerdekaan Indonesia.<sup>5</sup>

Gus Dur sendiri semenjak kecil hidup di lingkungan pesantren. Ia pun diajari pengetahuan tentang agama langsung dari sang pendiri NU, yakni K. H. Hasyim Asyari. Selain Hasyim Asyari, ada pula guru lain yang penting dalam kehidupannya, yakni Kiai Bisri Sansuri, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Khudori Tegal Rejo Magelang (yang merupakan tokoh perintis NU), Kiai Junaidi (salah satu tokoh majelis tarjih Muhammadiyah), dan K.H. Ali Maksum (pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta).<sup>6</sup>

Pada tahun 1949, Gus Dur mulai pendidikan formal di SD KRIS, lalu pindah ke SD Perwari Matramah. Tahun 1954, Gus Dur masuk ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Di sekolah ini ia tidak naik kelas, sehingga ia dipindahkan ke Yogyakarta. Tahun 1957, ia pindah ke Pesantren Tegal Rejo Magelang, di bawah didikan Kiai Khudori. Tahun 1959 Gus Dur pindah ke pesantren Tambakberas Jombang di bawah asuhan Kiai Wahab Chasbullah. Tahun 1963, Gus Dur pergi ke Mesir untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya secara penuh, karena merasa kecewa dengan sistem pendidikan universitas tersebut yang didasarkan pada metode hafalan, dengan begitu dia lebih banyak menghabiskan waktunya menonton film, sepak bola dan jalan-jalan. Lalu sampai akhirnya Gus Dur pindah ke Universitas Baghdad. Di sini ia belajar sastra, filsafat dan teori-teori sosial. Tahun 1970 ia menyelesaikan studinya, lalu ia sempat pula pergi ke Eropa

---

<sup>4</sup> Resdhia Maula Prachaya, *Konsep K. H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan Islam Multikultural*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, 29.

<sup>5</sup> Prachaya, *Konsep K. H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan*, 29-30.

<sup>6</sup> Prachaya, *Konsep K. H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan*, 31.

dan Kanada untuk meneruskan pendidikannya, namun kualifikasi pendidikan Timur tidak begitu diakui di Eropa sehingga ia pulang ke Indonesia.<sup>7</sup>

Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah, bahwa pada 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia yang ke-4.<sup>8</sup> Gusdur kemudian wafat pada tanggal 30 Desember 2009, di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pukul 18.45 WIB, akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.<sup>9</sup>

## 2. Wacana Pendidikan Multikulturalisme

Sebelum membahas pendidikan multikultural ala Gus Dur, perlu ada pembedaan terlebih dahulu antara pluralitas dan multikulturalisme. Dua hal ini memegang peranan penting dalam konteks wacana demokrasi, terkhusus di Indonesia. Alasan pembedaan ini ialah, menurut M. Zainal Abidin, gagasan multikulturalisme ini lahir kemudian setelah gagasan pluralisme (*pluralism*) dan keragaman (*diversity*).<sup>10</sup>

Pluralisme, bagi Abidin, sendiri berarti gagasan yang menegaskan tentang keanekaragaman ras, etnis, agama dan suku bangsa, lalu keanekaragaman itu mesti dibiarkan dalam kondisinya yang berbeda. Titik tekan pluralisme ada pada penegasan tentang “terdapatnya hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”. Lalu keragaman dan keberbedaan ini tak bisa dipersamakan atau diseragamkan.<sup>11</sup>

Multikulturalisme pun memiliki nafas yang sama dengan pluralisme, dalam artian, keduanya menekankan keragaman etnis, agama, budaya, dan lain semacamnya. Namun, penekanan multikulturalisme, terletak pada anggapan bahwa keragaman dan keanekaragaman sesuatu bisa hadir sebagai suatu hal yang sama di dalam ruang tertentu. Hadir secara sama ini berarti, bahwa dalam perbedaan, tiap-tiap bagian yang berbeda itu bisa bertemu satu sama lain. Pertemuan itu sendiri hadir di sebuah ruang yang mewadahi

---

<sup>7</sup> Prachaya, *Konsep K. H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan*, 31-33.

<sup>8</sup> Muhammad Rifai, *Gus Dur: K. H. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi, 2014), 75-76.

<sup>9</sup> Rifai, *Gus Dur*, 48.

<sup>10</sup> M. Zainal Abidin, *Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme*, dalam *Jurnal Millah* Vol. 8, No. 2 Februari 2009, 300.

<sup>11</sup> Abidin, *Perspektif Multikultural*, 300.

perbedaan tersebut, dan ruang tersebut dalam konteks multikultural ialah ruang publik yang demokratis.<sup>12</sup>

Multikulturalisme dengan demikian, bisa diartikan sebagai sebuah wacana dalam merajut kembali kerukunan dan toleransi di dalam perbedaan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Kerukunan dan toleransi ini bertujuan untuk menyatukan setiap elemen agar bisa hidup berdampingan secara damai. Perdamaian ini sendiri hanya mungkin diwujudkan dengan mengakui nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh multikulturalisme ialah nilai kemanusiaan, yakni yang mengakui bahwa tiap manusia memiliki hak dan kewajiban; meskipun tiap orang memiliki identitas yang berbeda-beda. Dengan demikian, multikulturalisme hadir sebagai sebuah wacana untuk menolak konflik, atau merehabilitasi konflik yang ada di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Pendidikan multikultural sendiri, menurut Herson Anwar, terdiri dari dua kata yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pendewasaan yang didasarkan pada pengembangan sikap dan perilaku, melalui proses pengajaran. Sedangkan multikultural berarti keragaman kebudayaan.<sup>14</sup>

Pendidikan multikultural adalah sebuah metode pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai toleransi, keadilan, kerjasama, dan tolong menolong. Ketika membahas multikultural sebagai penawaran terhadap sistem pendidikan, maka pembelajaran yang ditekankan adalah membicarakan perihal toleransi dan keberagaman kultur atau budaya yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia.

Gagasan pendidikan multikultural, menurut Ihwanul Mu'adib, berasal dari seorang pemikir Amerika Serikat bernama Prudence Crandall (1803-1890), yang menegaskan bahwa keragaman latar belakang setiap peserta didik memiliki nilai yang amat penting dalam proses pendidikan. Keragaman latar belakang ini tentu saja mencakup keragaman etnis, agama

---

<sup>12</sup> Abidin, *Perspektif Multikultural*, 301.

<sup>13</sup> Abidin, *Perspektif Multikultural*, 301.

<sup>14</sup> Herson Anwar, *Pendidikan Multikultural (Tinjauan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Pesantren dan Madrasah)*, dalam *Jurnal Irfani* Vol 12, No. 1 Juni 2016, 54.

dan budaya. Sikap memandang pentingnya keragaman latar belakang inilah yang melahirkan gagasan pendidikan multikultural.<sup>15</sup>

Pendidikan multikultural sendiri memiliki urgensinya sendiri di Indonesia. Alasannya, Indonesia hadir sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman dan perbedaan yang sangat kaya. Dalam perbedaan inilah, menurut Sagaf F. Pettalongi, dibutuhkan sebuah konsep pendidikan yang dapat memperhatikan perbedaan dan keragaman yang ada. Wujud pemberian perhatian ini tentu didasarkan pada asas keindonesiaan, yakni Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan wujud nilai yang dapat menaungi serta mempersatukan perbedaan yang ada.<sup>16</sup>

Dalam artian, pendidikan multikultural adalah sebuah sarana pembentukan kepribadian yang sopan santun, kerjasama dan tolong menolong. Menerapkan pemikiran multikultural dalam masyarakat dengan pendidikan sebagai mediator yang dikembangkan dalam refleksi sikap terhadap realitas yang terjadi di masyarakat. Menurut Reishda Maula Prachya yang mengutip pendapat dari Zakiyudin Bydhawhy, terkait pendidikan multikultural ia menyebut beberapa poin:

- a. Pendidikan yang bertujuan untuk belajar hidup dalam perbedaan
- b. Pendidikan yang membangun sikap saling percaya
- c. Pendidikan yang memelihara saling pengertian
- d. Pendidikan yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai
- e. Pendidikan yang mengajarkan berpikir secara terbuka
- f. Apresiasi interdepedensi, yaitu pendidikan yang menghargai budaya dan sosio-kultural

Resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan, yakni pendidikan yang mampu menyelesaikan konflik dan menganggap perbedaan itu bukan ditujukan untuk diskriminasi terhadap golongan lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ihwanul Mu'adib, *Pendidikan Berwawasan Multikultural Sebagai upaya Kontra Radikalisme (Studi di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung-ogor)*, dalam Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, 37-38.

<sup>16</sup> Sagaf F. Pettalongi, *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial*, dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan, Juni 2013, Th. XXXII, 117.

<sup>17</sup> Moch Shohib, *Substansi Pendidikan Multikultural Perspektif Gus Dur*, dalam Jurnal Edureligia Vol. 04, No 01, Januari-Juni 2020, 79.

### 3. Multikulturalisme *a la* Gus Dur

Terlepas dari sikap nyentriknnya, Gus Dur mempunyai peran penting dari beberapa aspek, dari mulai praktek politiknya sebagai politisi, gerakan sosialnya, peran intelektualnya sebagai tokoh agama maupun sebagai akademisi.<sup>18</sup>

Bagi Gus Dur pengakuan atas heterogenitas masyarakat, secara budaya, etnik, ras, agama pun gender merupakan sebuah pengakuan akan multikulturalisme dalam masyarakat. Multikulturalisme merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat yang heterogen, terkhusus untuk konteks negara Indonesia yang mensyaratkan keragaman budayanya yang diramu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Keberagaman ini, tak hanya melulu soal keberagaman di wilayah budaya masyarakatnya tetapi bahkan sampai meliputi keberagam corak ideologinya. Seperti halnya sikap Gus Dur yang mewacanakan untuk mencabut TAP MPRS XXVI tentang pelarangan Komunisme, Marxisme-Leninisme. Baginya pelarangan itu merupakan pencideraan terhadap cita-cita bangsa Indonesia awal, yang menghargai segala aspek perbedaan yang hadir dalam masyarakat, dan penghalangan atau pelarangan tersebut merupakan sebuah tindakan yang sia-sia bagi Gus Dur.<sup>19</sup>

Sebagai konsekuensi, kehadiran Gus Dur untuk memperjuangkan multikulturalisme sebagai perangkat atau alat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebhinakaan masyarakat Indonesia merupakan sebuah gagasan segar untuk kembali menghidupkan masyarakat demokratis di Indonesia—atau bahkan, ketika awal-awal meletusnya reformasi hal tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan baru.

Dalam arti lain, Gus Dur tak hanya sebatas memerjuangkan sebuah keberagaman dalam masyarakat, akan tetapi sebagai perjuangan kembali untuk mempersatukan perbedaan antar suku, ras, agama, ideologi di

---

<sup>18</sup> Greg Barton. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. (LKIS: Yogyakarta, cet X, 2011), 1-21.

<sup>19</sup> Wawancara ini, bisa dilihat secara lebih detail melalui kanal Youtube, dimana Gus Dur sebagai Pengurus Besar NU meminta maaf atas keterlibatan warga NU dalam politisida '65 dan secara terbuka mendukung serta mendorong untuk mencabut TAP MPRS XXVI tentang pelarangan ideologi Komunisme, Marxisme-Leninisme.

masyarakat Indonesia, yang Gus Dur anggap sebagai masyarakat yang plural.<sup>20</sup>

Gus Dur mewacanakan multikulturalisme dalam beberapa aspek untuk konteks Indonesia. *Pertama* soal Pribumisasi Islam. Permasalahan ini memang awalnya menentang wacana tentang sinkretisme—seperti yang dilakukan Sukarno—atau bentuk penjawanisian Islam. Gus Dur memaparkan kalau bentuk pribumisasi Islam tersebut, meliputi pada pertimbangan kebutuhan-kebutuhan lokal pada prosesi penetapan hukum agama (*istinbath*) tanpa menambah atau mengurangi hukum tersebut. Namun, dalam arti lain tak mesti juga untuk meninggalkan sebuah norma demi mempertahankan budaya lokal misalnya. Akan tetapi penetapan hukum tersebut mencari *nash-nash* yang yang sekiranya memungkinkan untuk bisa diterapkan sesuai budaya dan lingkungannya, pun memberi peran lebih dalam kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan ushul fiqhnya.<sup>21</sup> Hal demikian, multikulturalisme ini secara tidak langsung, bisa jadi menghadirkan kembali perdebatan soal landasan hukum dalam Islam antara hukum *'adhi* (budaya), hukum *syar'I* (norma) dan hukum *aqli* (rasionalitas).<sup>22</sup> Namun, bisa juga ini semacam jawaban atas perdebatan panjang tersebut.

*Kedua*, nilai multikulturalisme yang diperjuangkan oleh Gus Dur tertuang dalam 'Nilai-nilai Demokrasi dan HAM'. Ketika berbicara dan memperjuangkan sebuah demokrasi, maka konsekuensinya mesti menghilangkan atau setidaknya meminimalisir peran-peran anti-demokrasi. Dalam konteks Indonesia, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur untuk demokrasi adalah mereformasi militer yang selama kurang lebih tiga dekade berkuasa penuh.<sup>23</sup>

Dalam konteks pembacaannya dengan Islam, Gus Dur membicarakan demokrasi tersebut menimbang pada berbagai alasan seperti,

---

<sup>20</sup> Miskan, M.Pd.I. *Pemikiran Multikulturalisme KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, dalam Jurnal, Vol. VI No.2 Edisi September 2017-Februari 2018, hal 34-57

<sup>21</sup> Budhy Munawar-Rachman (peny). *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan dengan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 168-183.

<sup>22</sup> Desi Syafriani, *Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an dan Hadist*, dalam Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2018, 18-19.

<sup>23</sup> Rafiuddin D. Soaedy, *Taktik Presiden Gus Dur Memangkas Peran Politik TNI*, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/politik/taktik-presiden-gus-dur-memangkas-peran-politik-tni/>, 6 Oktober 2017, diakses pada 24 November 2020, 21.17 WIB.

asas Universalisme Islam secara aspek hukumnya; asas permusyawaratan dalam Islam (*amrhum syuras baynahum*); dan, asas memperbaiki kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Hal ini, selain persoalan politik negara, juga persoalan pendakuan atas siapa yang lebih berhak atas posisi paling mulia di hadapan masyarakat Indonesia, ketika itu dari kelompok Islam lah yang paling dominan menyuarakan hal tersebut. Juga wacana meninggikan kembali nilai-nilai demokrasi ini, Gus Dur sekaligus memutar balikan cara berpikir umumnya orang-orang yang memandang Islam sebagai ‘solusi-alternatif’ menjadi sebuah kerangka inspiratif dalam wacana kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

*Ketiga*, prinsip-prinsip Humanisme dan Pluralitas Masyarakat. Sudah mafhum, bahwa Gus Dur merupakan bapak pluralisme Indonesia. Pluralisme sendiri menjadi sebagai sala satu yang mensyaratkan bahwa demokrasi itu mampu tercipta dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, Gus Dur menitik beratkan bahwa jika demokrasi merupakan suatu keharusan dalam sebuah masyarakat yang plural. Konteks pembicaraan ini, kembali pada persoalan awal yaitu persoalan-persoalan sentimental rasial yang memang sengaja dibangun rezim militer Suharto, tak hanya atas persoalan kesukuan yang menimbulkan anti-Cina, juga merambah kepada keantiantian yang lain, anti-beda agama, anti-beda budaya, anti-beda bahasa dan lain hal yang senada.

*Keempat*, membahas tentang pluralisme yang ditawarkan Gus Dur melihat realitas masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Tradisi-tradisi keilmuan dengan corak keislaman latar bekakang Gus Dur, tentu melahirkan buah pemikiran yang masuk ke berbagai lini kehidupan. Mengimplementasi ajaran agama Islam Nusantara karena melihat bahwa dakwah yang dilakukan Islam sebelumnya juga melalui budaya sebagai mediasi masuknya Islam ke Indonesia.

#### **4. Gus Dur dengan tawaran Pendidikan Multikulturalnya**

Berangkat dari latar belakang pendidikan Gus Dur yang mempelajari berbagai ilmu agama di berbagai negara, juga studinya yang di negara Eropa, menghasilkan buah pemikiran yang kritis untuk menerapkan

---

<sup>24</sup> Rachman (peny), *Percakapan dengan Abdurrahman Wahid*, 168-183.

<sup>25</sup> Alif Pratama Susila, *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama*, dalam *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 117-118.

sistem pendidikan multikultural untuk diterapkan di Indonesia. Melihat realitas bahwasannya, Indonesia memiliki keberagaman suku, adat, ras dan agama, sama saja dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme juga mengajarkan satu individu untuk menghargai individu lainnya tanpa memandang mereka dari identitas yang mereka miliki. Memaknai pendidikan sebagai suatu kebutuhan, dan setiap manusia dari golongan manapun berhak mendapatkannya.

Menurut Eko Setiawan, secara spesifik dalam pendidikan multikulturalnya Gus Dur menekankan bahwa setiap pendidikan harus didasarkan pada keberagaman, yang mana keberagaman itu sendiri didasari oleh pluralitas kebudayaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam hal ini, Gus Dur menekankan, bahwa setiap orang yang terlibat di dalam proses pendidikan, mesti percaya diri dengan kultur yang dibawanya masing-masing.<sup>26</sup>

Pendidikan multikultural ini ditujukan agar setiap orang yang terlibat di dalam proses pendidikan, yang memiliki perbedaan ras, suku, etnis, agama dan juga budaya, dapat diperlakukan secara setara atau sama (adil). Adapun pendidikan multikultural ala Gus Dur ini didasarkan atas beberapa prinsip penting. *Pertama*, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah gerakan keadilan, di mana setiap warga diperlakukan secara adil "tanpa" merisaukan latar belakang yang berbeda-beda.<sup>27</sup> Dalam hal ini tiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan, menurut Moch Shohib, mesti menghargai budaya lokal yang mereka miliki (sebagai identitas yang dimiliki). Namun, penghargaan—yang tentu berimplikasi ada pelestarian—atas budaya lokal, tidak berarti membuat tiap orang bersikap antipati terhadap budaya modern. Singkatnya, tiap orang tetap sadar bahwa kebudayaan yang dimiliki masing-masing orang, merupakan suatu hal yang internal dalam sistem pendidikan.<sup>28</sup>

*Kedua*, terdapat dua dimensi dalam pendidikan multikultural, yakni pembelajaran dan pelembagaan, yang mana keduanya tak bisa dipisahkan satu sama lain, dan mesti ditangani melalui reformasi komprehensif. *Ketiga*, pendidikan multikultural harus bisa menyediakan kesempatan bagi setiap

---

<sup>26</sup> Eko Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Prinsip Pendidikan Islam: Multikulturalisme Berawawasan Keislaman*, dalam *Jurnal Edukasia Islamika Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 1 Juni 2017, 42.

<sup>27</sup> Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid*, 42.

<sup>28</sup> Shohib, *Pendidikan Multikultural Perspektif Gus Dur*, 83.

orang di dalam proses pendidikan, kemudian di dalamnya setiap orang dapat mewujudkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang.<sup>29</sup>

*Keempat*, pendidikan multikultural mesti berakar pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, pendidikan jenis ini, merupakan wujud pendidikan yang menolak dominasi. Penekanan atas nilai kemanusiaan dan keadilan ini tentu berkelindan dengan prinsip Gus Dur sendiri terkait kemestian tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga Demokrasi. Kedua hal ini merupakan suatu hal yang substansial di dalam sebuah negara, terkhusus Indonesia. Menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi tentu merupakan upaya untuk menjaga kebebasan sebagai tonggak utama masyarakat yang berkeadilan. Dari kebebasan inilah kreatifitas dan produktifitas tiap orang dapat terdongkrak dengan baik.<sup>30</sup>

Dari prinsip-prinsip itulah kemudian muncul beberapa implikasi penting dalam proses pembelajaran. *Pertama*, bahwa dalam proses pendidikan, latar belakang yang berbeda-beda meniscayakan sebuah pengajaran yang tidak monolitik. Artinya, pembelajaran yang dienyam oleh peserta didik tidak didasarkan pada pola pemberian bahan ajar yang tunggal, melainkan mesti didasarkan pada sebuah keterbukaan; yang tentu saja melibatkan keberagaman perspektif setiap orang. *Kedua*, pendidikan multikultural, dalam proses ajarnya merupakan sebuah representasi dari keberagaman suara dari setiap orang.<sup>31</sup>

*Ketiga*, kurikulum pendidikan mesti diposisikan sebagai kurikulum yang terbuka ke dalam proses dialogis, karena melibatkan kebudayaan yang berbeda-beda. *Keempat*, bahwa bentuk pendidikan multikultural mestinya bisa dan mampu memberantas pandangan usang terkait ras, etnis dan kebudayaan. Pandangan klise ini mengacu pada pandangan yang menganggap benar satu-satunya ras, etnis dan kebudayaan tertentu; yang mana membawa pada eksklusivisme.<sup>32</sup>

### C. SIMPULAN

Indonesia hadir sebagai negara yang memiliki masyarakat beragam. Keberagaman ini nampak pada keberagaman etnis, budaya dan

---

<sup>29</sup> Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid*, 43.

<sup>30</sup> Shohib, *Pendidikan Multikultural Perspektif Gus Dur*, 83.

<sup>31</sup> Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid*, 43.

<sup>32</sup> Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid*, 43.

kepercayaan. Keberagaman ini di satu sisi menjadi sebuah kekayaan tersendiri. Namun, di sisi lain, keberagaman ini bisa menjadi petaka tersendiri, alasannya karena di dalam keberagaman potensi konflik bisa menganga. Salah satu alat untuk mencegah dan menjadi solusi konflik karena keberagaman itu adalah melalui pendidikan, karena di dalam pendidikan terdapat proses pembentukan sikap dan juga karakter seseorang. Namun, di sini diperlukan sebuah pola pendidikan yang dapat cocok dengan pemberantasan konflik tersebut. Sistem yang dianggap bisa menanggulangi hal tersebut ialah pendidikan multikultural, dan tokoh yang bicara tentang hal itu adalah Gus Dur.

Gus Dur hadir dengan wacana multikultural. Multikulturalisme itu sendiri merupakan konsep bahwa keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat, merupakan sebuah kekayaan, dan kekayaan keberagaman ini hanya mungkin terjadi jika terdapat toleransi dan dialog. Dengan demikian keberagaman budaya yang ada mesti dianggap sebagai suatu hal yang niscaya, dan tiap elemen yang terlibat dalam keberagaman itu mesti diperlakukan secara adil. Keadilan itu sendiri hanya mungkin mewujudkan jika didasarkan pada penjunjungan tinggi atas HAM dan juga nilai-nilai demokratis.

Dengan demikian, dalam pemikiran Gus Dur, pendidikan multikultural berarti sebuah pendidikan yang tidak mengenyampingkan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam prosesi pendidikan. Lalu, latar belakang ini pun mesti dianggap sebagai bagian internal di dalam sebuah sistem pendidikan, yang mana tentu akan berpengaruh pada sistem pembelajaran secara konkret: dalam pembuatan kurikulum dan pola belajar.

Dalam pendidikan multikultural tiap orang mesti percaya diri dengan latar belakang kebudayaan yang dimilikinya. Lalu perbedaan ini dijamin sepenuhnya oleh nilai-nilai demokrasi di mana tiap orang diperlakukan setara dan juga adil. Dalam artian, tiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dijamin tak akan mengalami tindakan diskriminasi. Lebih jauh, keberbedaan ini juga mesti dilibatkan dalam proses pendidikan. Keterlibatan ini bisa dilihat dalam penekanannya atas dialog, di mana tiap orang mesti selalu terbuka terhadap keberagaman perspektif, sehingga pola pendidikan yang ada tidak hadir secara monolitik dan eksklusif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budhy Munawar-Rachman (peny). *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan dengan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011).
- Greg Barton. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Ihwanul Mu'adib, *Pendidikan Berwawasan Multikultural Sebagai upaya Kontra Radikalisme (Studi di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parungogor)*, dalam Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Muhammad Rifai, *Gus Dur: K. H. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, Yogyakarta: Garasi, 2014.
- Resdhia Maula Prachaya, *Konsep K. H. Abdurrahman Wahid Tentang Pendidikan Islam Multikultural*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

### Jurnal

- Alif Pratama Susila, *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama*, dalam *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Desi Syafriani, *Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an dan Hadist*, dalam *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Eko Setiawan, *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Prinsip Pendidikan Islam: Multikulturalisme Berawawasan Keislaman*, dalam *Jurnal Edukasia Islamika Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Herson Anwar, *Pendidikan Multikultural (Tinjauan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Pesantren dan Madrasah)*, dalam *Jurnal Irfani* Vol 12, No. 1 Juni 2016.
- M. Zainal Abidin, *Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme*, dalam *Jurnal Millah* Vol. 8, No. 2 Februari 2009.
- Miskan, M.Pd.I. *Pemikiran Multikulturalisme KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal*, Vol. VI No.2 Edisi September 2017-Februari 2018.

Moch Shohib, *Substansi Pendidikan Multikultural Perspektif Gus Dur*, dalam *Jurnal Edureligia* Vol. 04, No 01, Januari-Juni 2020.

Sagaf F. Pettalongi, *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial*, dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Juni 2013, Th. XXXII.

### Website

Ign. L. Adi Bhaskara, *Survei Komnas HAM: Diskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolelir*, <https://amp.tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolelir-dahP>, 21 November 2018.

*Pelaku Rasisme Bisa Dijerat UU Diskriminasi Ras dan Etnis*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pwxxvo409>, 28 Agustus 2019.

Rafiuddin D. Soaedy, *Taktik Presiden Gus Dur Memangkas Peran Politik TNI*, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/politik/taktik-presiden-gus-dur-memangkas-peran-politik-tni/>, 6 Oktober 2017.